

Penerimaan negara dari sektor sawit: Apakah  
Inpres Moratorium Sawit berdampak pada  
menurunnya penerimaan negara dari sektor  
sawit?

Auriga Nusantara  
15 September 2021

# Outline presentasi

Peran sawit dalam  
perekonomian Indonesia

Pajak dari sektor sawit

Fakta penerimaan di sektor  
sawit

DBH perkebunan sawit

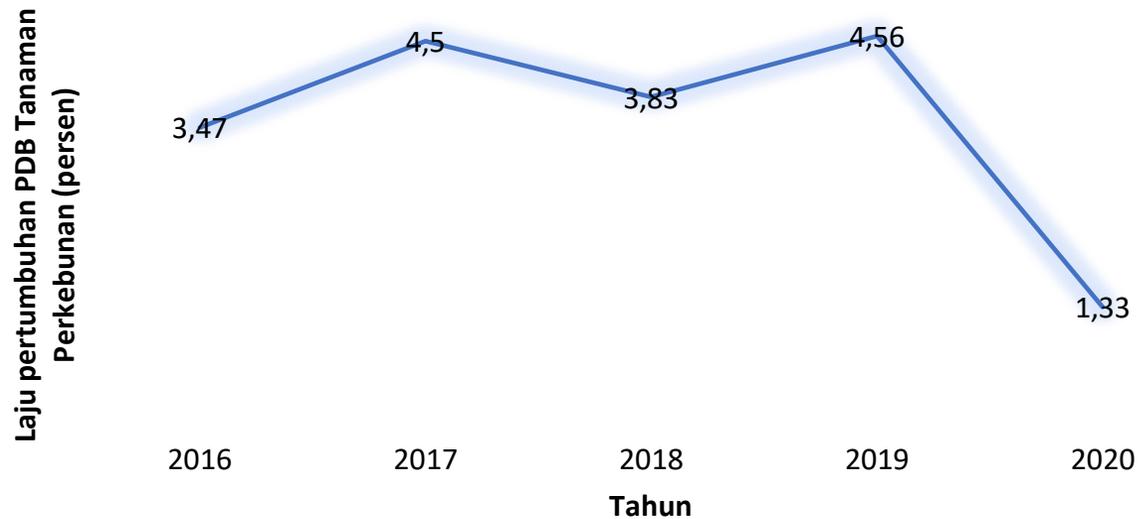
Penutup



# Peran sawit dalam perekonomian Indonesia

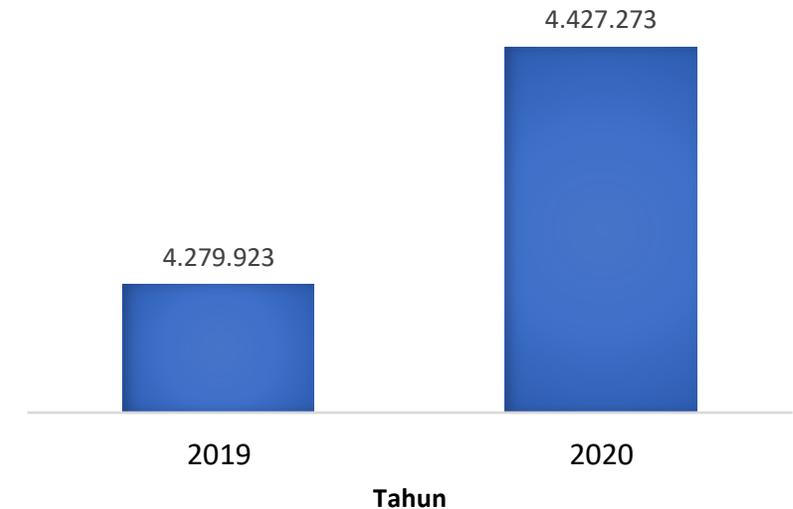
- Selama masa pandemi, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi sebesar -2,07% (BPS, 2020). Namun, sektor tanaman perkebunan tumbuh positif.
- Ekspor minyak sawit Mei 2021 menjadi rekor bulanan tertinggi sepanjang sejarah sebesar US\$ 3,063 miliar.
- Sektor sawit menyerap tenaga kerja sebanyak 147.350 orang pada 2020 - naik 3,4% (Ditjenbun, 2021. Diolah).
- Sektor sawit berkontribusi terhadap penerimaan negara melalui penerimaan pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Pertumbuhan PDB Sub-Sektor Tanaman Perkebunan 2016-2020



Sumber: BPS (diolah)

Jumlah Tenaga Kerja



Sumber: Ditjenbun (diolah)

# Pajak dari sektor sawit

Kebun



PKS



Penjualan CPO  
& PKO



# Pajak dari kebun

- |   |   |                                     |
|---|---|-------------------------------------|
| 1. Perizinan lahan perkebunan           | → | PBB                                 |
| 2. Tahap survei dan perencanaan         | → | PPh Ps. 23, 26 dan PPN              |
| 3. Pembukaan lahan dan pematangan tanah | → | PPh Ps. 21<br>PPh Ps. 23 dan 26     |
| 4. Persiapan lahan dan infrastruktur    | → | PPh Ps. 23,26 dan PPN               |
| 5. Tahap pembibitan                     | → | PPh Ps. 21                          |
| 6. Penanaman dan pemeliharaan           | → | PPh Ps. 21                          |
| 7. Tahap pemanenan                      | → | PPh Ps. 21                          |
| 8. Tahap penjualan TBS                  | → | PPh Ps. 21<br>PPh Ps. 25 PPh Ps. 22 |

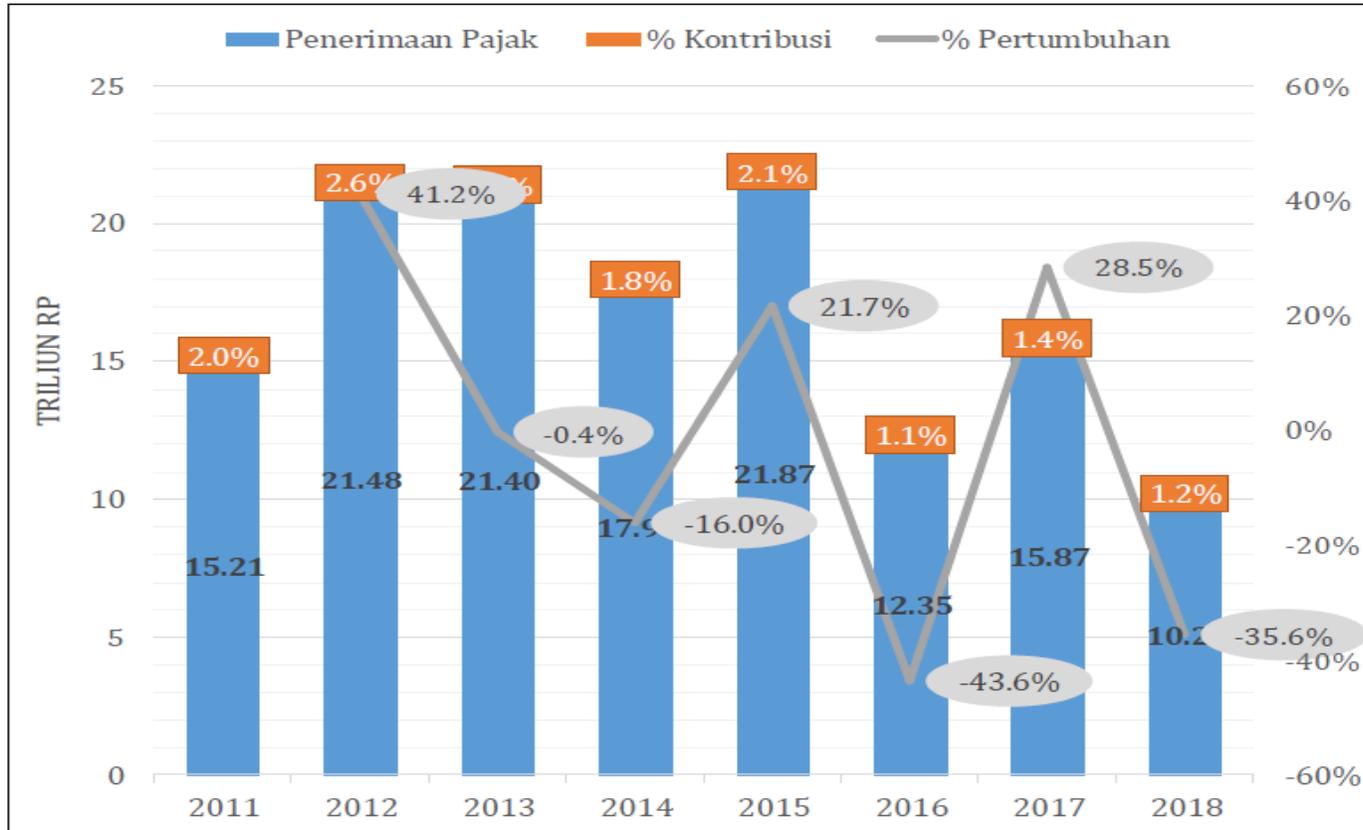
# Pajak dari PKS

1. Tahap Pembangunan Pabrik	→	PPh Ps. 23/26 PPh Ps. 23 PPh Ps. 23/26 PPh Ps. 23/26 PPN Masukan
2. Pengadaan TBS	→	PPh Ps. 22
3. Tahap Proses Produksi CPO	→	PPh Ps. 21

# Pajak dari penjualan CPO dan PKO

- |                  |   |                                |
|------------------|---|--------------------------------|
| 1. Penjualan CPO | → | PPN<br>PPh Final<br>PPh Ps. 25 |
| 2. Jasa Olah     | → | PPN                            |

# Penerimaan pajak belum optimal



Sumber: DJP, 2018.

Potensi pajak sektor sawit sebesar Rp 40 triliun

Sumber: KPK, 2016



Pajak yang dipungut (triliun rupiah)

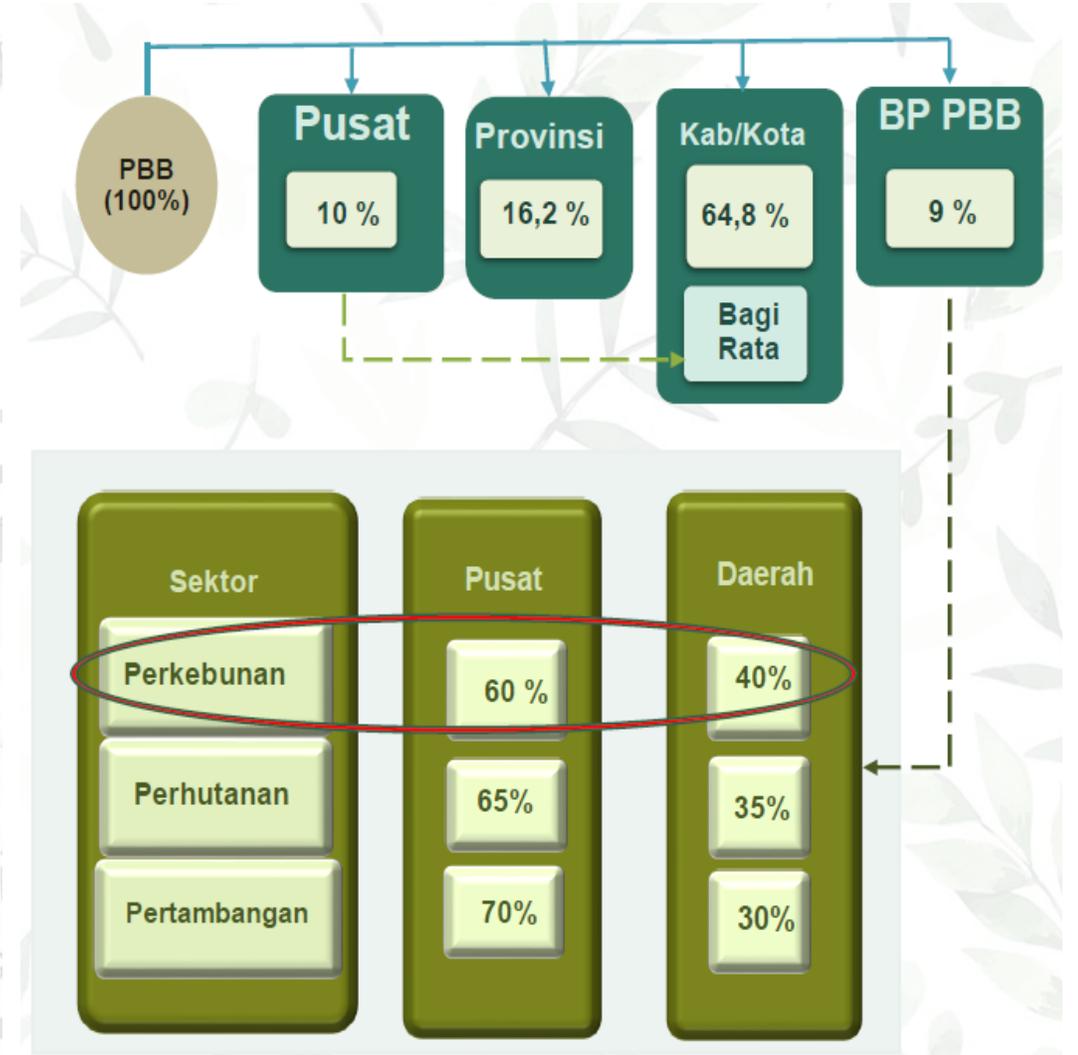
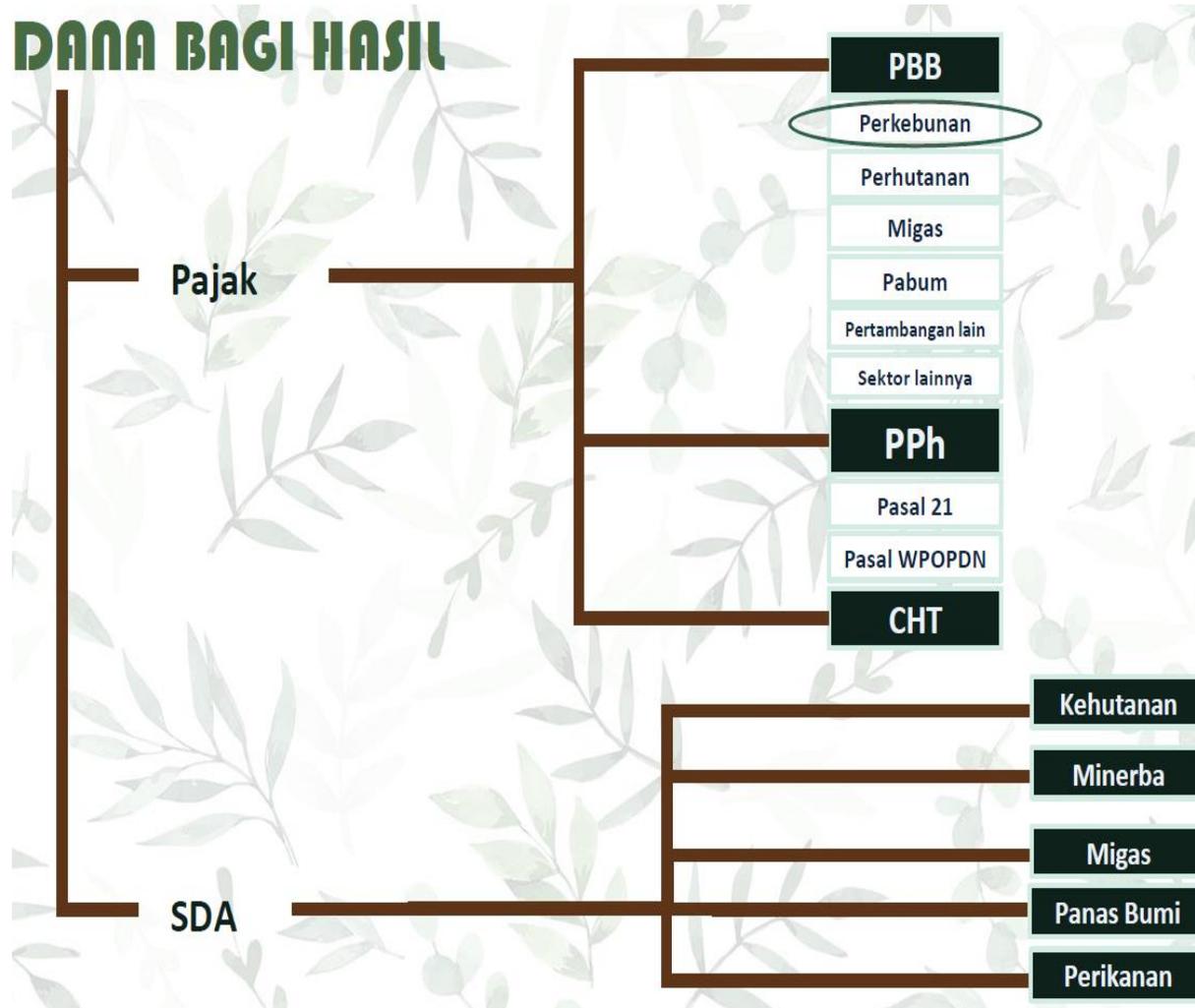
Pajak yang tidak terpungut (triliun rupiah)

## Penerimaan pajak belum optimal (2)

- Pada 1989-2017, minyak sawit mengalami kebocoran perdagangan keluar dengan cara under-invoicing sebesar US\$1,28 miliar (The Prakarsa, 2019).
- Under-invoicing ekspor disinyalir digunakan untuk mengurangi pembayaran pajak dan royalti di dalam negeri (GFI, 2019).

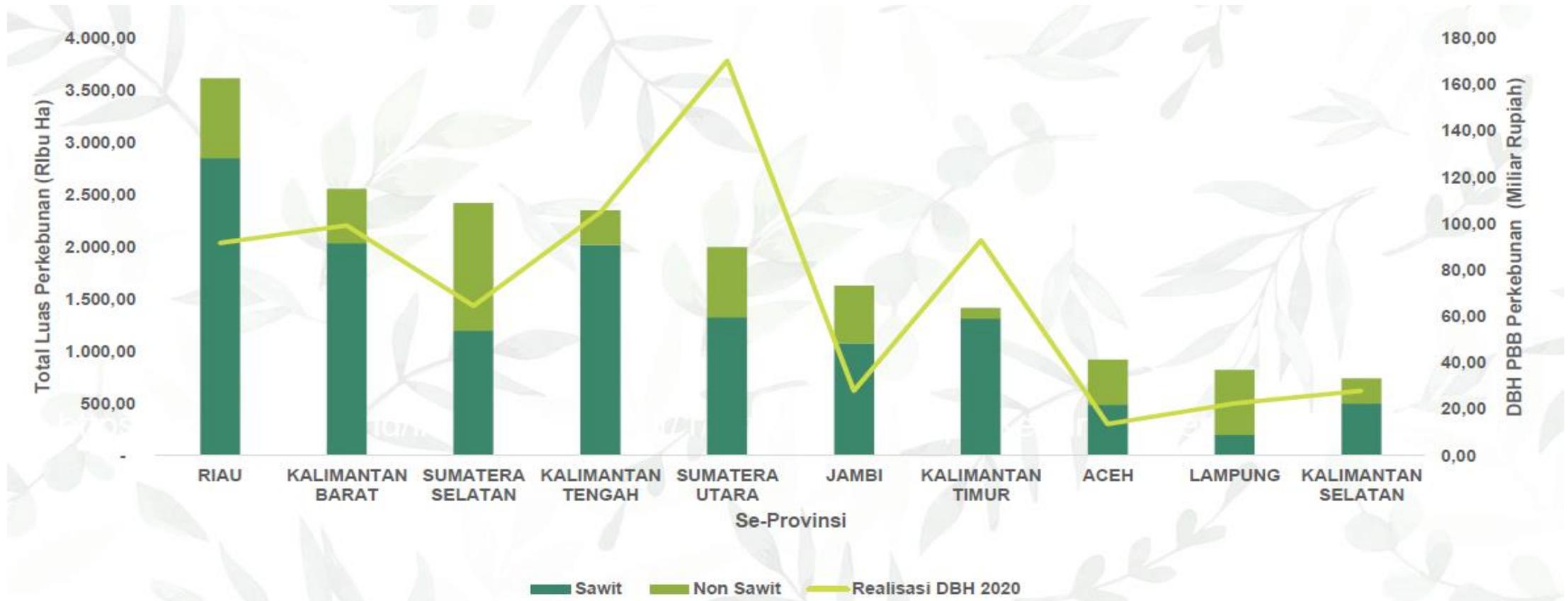
# DBH perkebunan sawit

## DANA BAGI HASIL

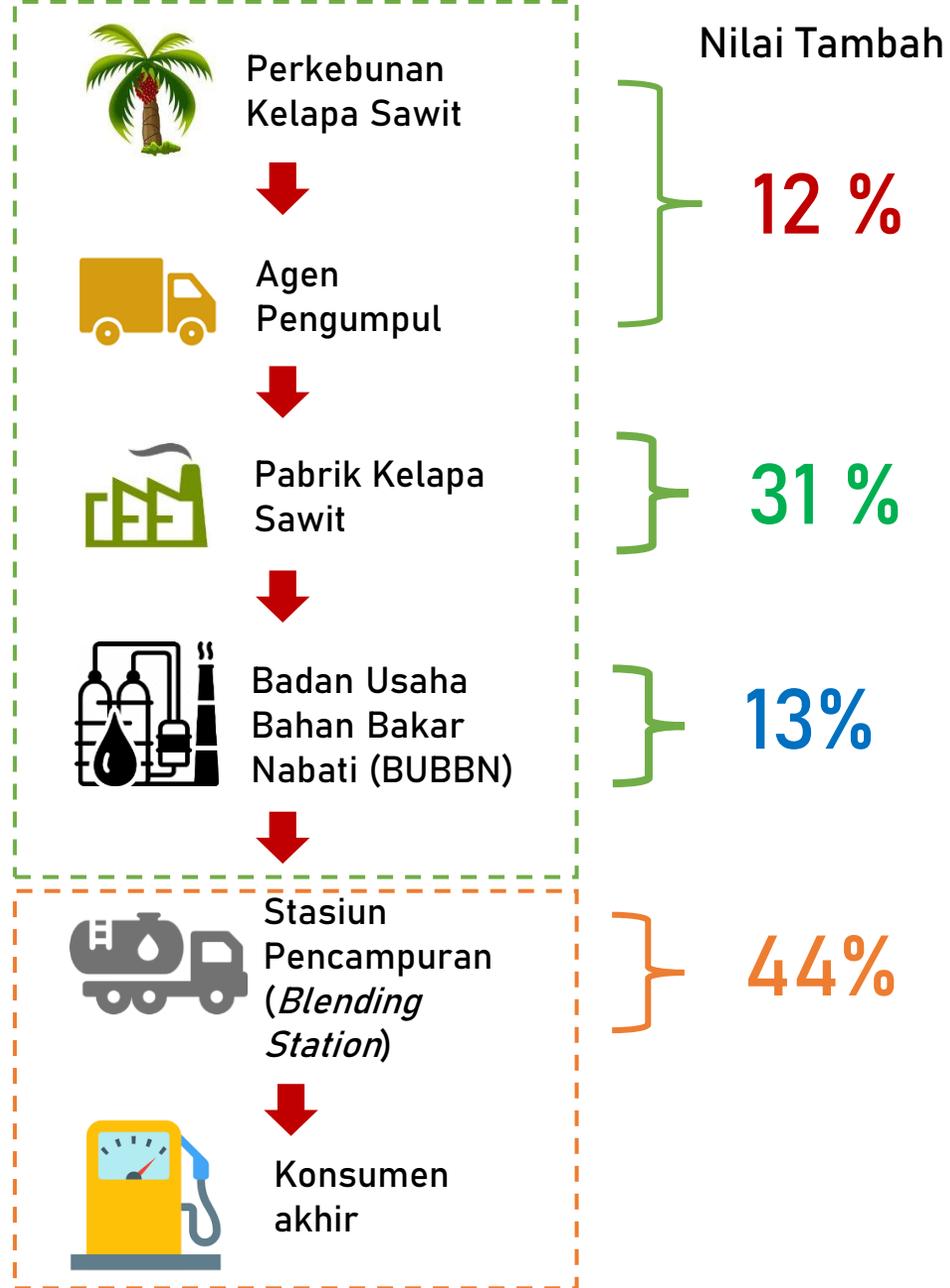


# DBH PBB perkebunan sawit (2020)

- Fakta di daerah: kapasitas fiskal rendah, beban tanggung awab besar, dampak ekologi.
- DBH PBB tidak selalu berbanding lurus dengan luas perkebunan karena perhitungan PBB dipengaruhi oleh berbagai faktor, misal NJOP.



# Rantai nilai industri sawit



Sektor hulu (perkebunan) merupakan pihak yang menerima nilai tambah **paling kecil, 12%** dari keseluruhan rantai nilai di Industri sawit nasional, khususnya biodiesel.

Rendahnya nilai tambah di sektor perkebunan sawit diakibatkan oleh berbagai faktor, diantaranya yaitu **inefisiensi rantai pasok, tidak terbukanya data harga TBS, kelembagaan yang lemah, dominasi sekelompok perusahaan**, dll.

Industri **oleokimia** di Indonesia masih belum banyak berkembang (saat ini ada 19 perusahaan). Industri ini diestimasikan dapat memberi nilai tambah hingga **200%**<sup>2</sup>



## Penutup

- Potensi penerimaan dari sektor sawit masih jauh dari optimal.
- DBH yang diterima oleh daerah dengan kepemilikan kebun sawit sangat kecil.
- Sektor hulu hanya memiliki nilai tambah 12%.
- Perpanjangan moratorium sawit tidak berarti akan mengurangi penerimaan negara.